



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO)
UNIT KERJA : DIREKTORAT UTAMA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HEXANA TRI SASONGKO
2. Jabatan : DIREKTUR UTAMA
3. NHK : 130166

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 7.367.057.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 332 m²/232 m² di KAB / KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 552 m²/80 m² di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 2.197.445.250
3. Tanah Seluas 534 m² di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 169.611.750

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 334.000.000

1. MOBIL, HONDA FREED Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
2. MOBIL, NISSAN XTRAIL Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
3. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
4. MOBIL, TOYOTA AVANZA Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 327.749.965**D. SURAT BERHARGA** Rp. 9.104.495.350**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 13.576.458.789**F. HARTA LAINNYA** Rp. 3.054.516.077**Sub Total** Rp. 33.764.277.181**III. HUTANG** Rp. ---**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 33.764.277.181



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO)
UNIT KERJA : WAKIL DIREKTORAT UTAMA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HARU KOESMAHARGYO
2. Jabatan : WAKIL DIREKTUR UTAMA
3. NHK : 191236

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 49.533.780.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 250 m2/245 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 3.585.750.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 165 m2/117 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 2.123.778.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 165 m2/117 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 2.079.786.000
4. Bangunan Seluas 70 m2 di NEGARA USA, HASIL SENDIRI Rp. 3.094.420.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 650 m2/350 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 5.844.250.000
6. Bangunan Seluas 20 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 101.227.500
7. Bangunan Seluas 20 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 101.227.500
8. Bangunan Seluas 21 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 323.400.000
9. Bangunan Seluas 21 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 302.500.000
10. Bangunan Seluas 22 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 323.400.000
11. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/192 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 229.400.000
12. Bangunan Seluas 20 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL



SENDIRI Rp. 202.195.000

13. Bangunan Seluas 17.55 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 224.035.000

14. Tanah dan Bangunan Seluas 122 m2/139 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 3.096.777.000

15. Tanah dan Bangunan Seluas 156 m2/234 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 1.478.370.000

16. Tanah Seluas 93 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 380.000.000

17. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/42 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 326.922.000

18. Tanah dan Bangunan Seluas 238 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 7.501.691.000

19. Tanah Seluas 593 m2 di KAB / KOTA KOTA MADIUN , WARISAN Rp. 233.642.000

20. Tanah dan Bangunan Seluas 304 m2/570 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 10.397.370.000

21. Tanah dan Bangunan Seluas 268 m2/250 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 3.294.174.000

22. Tanah dan Bangunan Seluas 233 m2/439 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 2.737.940.000

23. Tanah dan Bangunan Seluas 91 m2/105 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 432.705.000

24. Tanah Seluas 116 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 1.118.820.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp.

1.947.000.000

1. MOTOR, YAMAHA VEGA R SEPEDA MOTOR Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000

2. MOBIL, BMW X5 Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000

3. MOTOR, HONDA PRO BEAT Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000

4. MOBIL, SUZUKI PICK UP Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000

5. MOBIL, TOYOTA ALPHARD Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 1.370.000.000



6. MOTOR, VESPA PRIMAVERA Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp.
50.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	1.059.964.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	42.515.474.575
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	9.110.365.544
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	104.166.584.119
III. HUTANG	Rp.	401.947.113
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	103.764.637.006

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.